



PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan target yang direncanakan. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian kinerja. Oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas pelaksanaan tugas tahun anggaran 2025, yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029.

Akhirnya kami berharap Laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Lolak, Januari 2026

KEPALA DINAS,


JULIN ESTER PAPULING, SKM, ME

Pembina Utama Muda
Nip. 19700706 199203 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Permasalahan Utama	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	17
2.2. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2. Realisasi Anggaran	25
3.3. Anggaran dan Realisasi per Kegiatan	35
BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan atas capaian kinerja organisasi	
4.2. Saran dan tindak lanjut	46

LAMPIRAN LKIP TAHUN 2024 :

SK Penetapan Indikator Kinerja Utama & Lampiran SK IKU

Rencana Kinerja Tahunan

Pengukuran Kinerja

Pohon Kinerja

Cascading

Rencana Aksi

Tabel Keselarasan

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Perjanjian Kinerja (PK)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow	10
---	----

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Komposisi ASN	11
Tabel 1.2 Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2024	12
Tabel 1.3 Komposisi struktur Pejabat Struktural Berdasarkan golongan dan pendidikan.....	13
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan eselon	13
Tabel 1.5. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	14
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Umur	15
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah	18
Tabel 2.2 Perjanian kinerja	19
Tabel 3.1 Perbandingan capaian anggaran tahun 2022 dan 2024.....	35
Tabel 3.2 Capaian Tujuan dan Sasaran DPPKB.....	35
Tabel 3.3 Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal	37
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bolaang Mongondow

Gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow, memuat informasi tentang peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (tugas dan fungsi) , penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bolaang Mongondow adalah Dinas Tipe A, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.

Adapun maka struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat, membawahkan**
 - a. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Anggaran dan Sarana
- 3. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan**
 - a. Penata kependudukan dan keluarga berencana bidang keluarga berencana
 - b. Penata kependudukan dan keluarga berencana bidang keluarga berencana
- 4. Bidang Pengendalian penduduk, membawahkan :**
 - a. Penata kependudukan dan keluarga berencana bidang pengendalian penduduk
 - b. Penata kependudukan dan keluarga berencana bidang pengendalian penduduk



5. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :

- a. Penata kependudukan dan keluarga berencana bidang penyuluh dan pergerakan
- b. Penata kependudukan dan keluarga berencana bidang Penyuluh dan Pergerakan

6. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan, membawahkan

- a. Penata kependudukan dan keluarga berencana bidang kesejahteraan keluarga
- b. Penata kependudukan dan keluarga berencana bidang kesejahteraan keluarga

Sedangkan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan program di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

a. Kepala Dinas

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
3. pengendalian kualitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
6. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
7. pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana .
8. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB
9. Pelaksanaan dan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
10. Pelaksanaan pelayanan KB.
11. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
12. kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
13. Penyelenggaraan urusan kesertarian.
14. Pembinaan kelompok jabatan fungsional ; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan



Sekretaris

1. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan pelayanan administrasi lingkup unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Penyelenggarakan urusan administrasi umum, hukum dan kepegawaian
3. Penyelenggaraan urusan keuangan
4. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan ;dan
5. Pelaporan Pelaksanaan tugas Kepala Dinas .

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian :

- 1 Mempersiapkan rencana kegiatan tahunan
- 2 Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum
- 3 Menyiapkan, Menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum
- 5 Penyelenggarakan kegiatan penerimaan, registrasi, menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- 6 Penyelenggarakan kegiatan ketatausahaan pimpinan;
- 7 Menyusun dan menyiapkan rancangan prosedur tetap/standar operasional prosedur dari bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas
- 8 Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas (SPT/SPPD);
- 9 Mengumpul, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- 10 Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- 11 Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris asset, arsip, dokumentasi dan argumentasi;
- 12 Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Dinas



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu inventaris Barang (KIB),Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku induk Inventaris (BII) sesuai Kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

- 13 Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris;
- 14 Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 15 Melaksanakan administrasi rumah tangga dan perlengkapan;
- 16 Menyusun Daftar Nominatif dan Daftar Uruf Kepangkatan (DUK);
- 17 Melaksanakan Kegiatan rekapitulasi data kehadiran pegawai online (fingerprint) dan manual di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 18 Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- 19 Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Program Keuangan dan pelaporan

1. Mempersiapkan rencana kegiatan tahunan;
2. Mengkompilasikan dan Menyusun rencana
3. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran dinas;
4. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dananggaran tahunan;
5. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target pelaksanaan programdan kegiatan dinas;
6. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan,perbendaharaan dan gaji;
7. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
8. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
9. Menyusun rencana penggunaan uang per mata anggaran ;
10. Menyusun laporan keuangan;



11. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan ;
12. Menyiapkan pengembangan system dan prosedur akuntansi;
13. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
14. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA);
15. Memberikan pertimbangan kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
16. Membuat laporan pelaksanaan tugas ; dan
17. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Penduduk

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
2. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga
3. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang system informasi keluarga;
4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
5. Pelaksanaan Pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk
6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
8. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas;

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemantuan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di kabupaten



bolaang mongondow.

- b. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi serta evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah;

e. **Bidang Keluarga Keluarga,**

- 1 Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana.
- 2 Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana
- 3 Penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana
- 4 Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi .
- 5 Pelaksanaan pelayanan KB
- 6 Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB
- 7 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana
- 8 Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang keluarga berencana;
- 9 Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dan
- 10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon.
- b. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana bertugas menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan evaluasi jaminan pelayanan KB dan pemantauan evaluasi pembinaan peningkatan kesertaan ber KB.



f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

1. Perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten bolaang mongondow dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. Perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten bolaang mongondow dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarg
3. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten bolaang mongondow dibidang bina keluarga balita;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten bolaang mongondow dibidang pembinaan ketahanan remaja;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten bolaang meongondow dibidang bina keluarga lansia dan rentan;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis kabupaten bolaang mongondow dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - a. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,norma, standard, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria serta pemamtauan dan evaluasi pembinaan ketahan keluarga balita, anak dan lansia serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga.

g. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

- 1 Perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten bolaang mongondow dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- 2 Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten bolaang mongondow di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3 Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten bolaang mongondow di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 4 Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- 5 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan , advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 6 Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas

- a. penyiapan bahan pembinaan , pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan KIE.
- b. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Penggerakan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP ; Seksi Advokasi, Penggerakan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerak serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

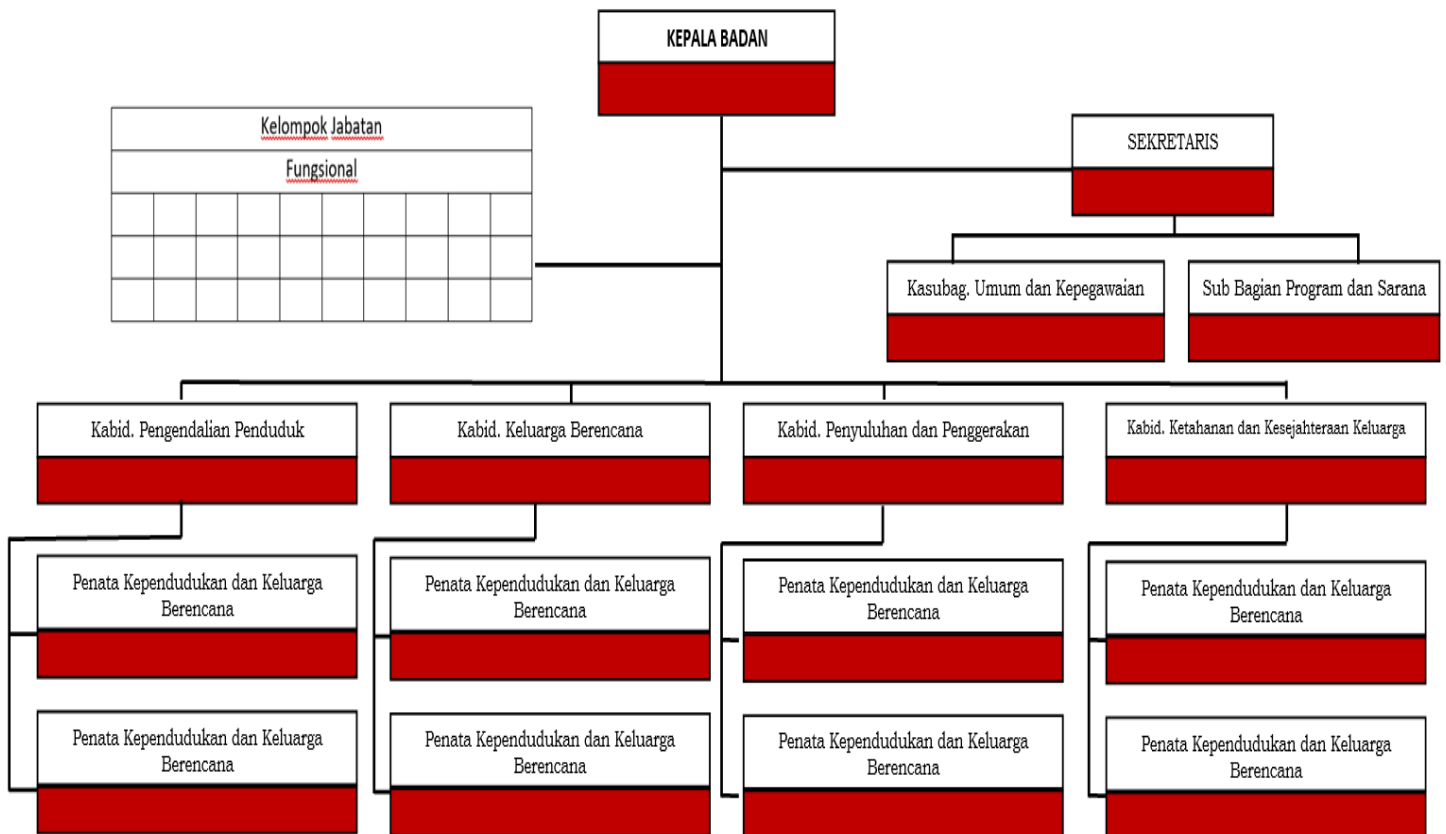
h. . **KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL.**

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku



Lampiran : Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Tipe A**



Gambar 1.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bolaang Mongondow Tipe A



Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas, sampai dengan bulan Desember 2024 jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana adalah sebanyak 17 orang, untuk Pangkat/Golongan, Jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini ;

Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 16 orang yang terdiri dari ASN Daerah, dibantu oleh 3 orang tenaga honorer. Seperti tabel di bawah ini .

Tabel 1.1 Komposisi ASN
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bernecana

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1.	Julin Ester Papuling, SKM, ME	197007061992032 007	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas
2.	Nurmala Paputungan, S.Km	19740107 199303 2 001	Pembina, IV/a	Sekretaris
3.	Yasni Adnan, SE	1969051119890 32010	Pembina, IV/a	Kabid. Keluarga Berencana
4.	Drs. Sofyanto, S.Si	197405211994021 001	Pembina Tingkat I , IV/b	Kabid. Pengendalian Penduduk
5.	Wima Juniarti, SE,MSi	1971060619910 32008	Pembina, IV/a	Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6.	Helke D.M. Moningka,SP	1968033119880 32007	Penata Tkt I. III/d	Penata Kependudukan dan keluarga berencana
7.	Deli H.Damopolii, S.Sos	1969081120090 22001	Penata Tkt I. III/d	Penata Kependudukan dan keluarga berencana
8.	Marlina Sampaleng,SE	1982022620090 22002	Penata Tkt I. III/d	Penata Kependudukan dan keluarga berencana



9.	Rini Pakaya, S.Pi,M.Si	10771213 201102 2 001	Penata Tingkat I / IIId	Kasubag Pelaporan dan Sarana
10.	Widi Astuti Bambela Amd.Ak	1976121620021 22008	Penata Muda Tkt I.III/b	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
11.	Lies Jenny E. Lapod	1973011320021 22006	Penata Muda tgkt I, III/b	Pelaksana
12.	Djuliha Mokoginta	1971120320070 12007	Penata Muda, III/a	Pelaksana
13.	Kerestian Winokan	1980072320070 11007	Pengatur Muda, II/a	Pengelola Aset dan BMN
14.	Arnibeby Makalalag	1975033020141 22001	Pengatur Muda Tgkt I, II/b	Bendahara Pengeluaran
15.	An Mokodompit	1971040220252110 03	Gol V / PPPK	Pelaksana

Sumber : Daftar Nominatif ASN DPPKB Kab. Bolmong, 2025

Tabel 1.2 Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1	Gabriel Marjulando Tangkere, S.IP, M.Si	Pengemudi Kendaraan Kepala Dinas
2	Febrianti Balandatu	Cleaning Service

Sumber : Data Tenaga Honorer Kategori II, 2025



Tabel 1.3
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Pendidikan Terakhir Educational Attainment	Jenis Kelamin / Sex			KETERANGAN Information
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sampai dengan SD				
SLTP / Sederajat				
SLTA / Sederajat	2	4		
Diploma I				
Diploma II				
Diploma III		1		
Diploma IV				
Strata 1 / S1 / Bachelor's Degree	1	3		
Strata 2 / S2 / Master's Degree	1	3		
Strata 3 / S3 / Doctoral	-	-	-	
Jumlah / Total	4	11	15	

Tabel 1.4
Jumlah pegawai Berdasarkan Eselon

No	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II B		1	1
2	Eselon III A	-	1	1
3	Eselon III B	-	4	4
4	Eselon IV A Fungsional	-	2	4
	Eselon IV A Struktural		2	
	Jumlah	-	10	10



Tabel 1.5
Jumlah pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV c	-	1	1
2	IV b	1	-	1
3	IV a	-	3	3
4	III d	-	3	3
5	III c	-	0	0
6	III b	-	2	2
7	III a	1	1	2
8	II d			-
9	II c		-	-
10	II b	-	1	1
11	II a	2		2
	Jumlah	4	11	15



Tabel 1.6
Jumlah pegawai Berdasarkan Umur

NO	Unit Kerja	Usia (Tahun)							JLH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	> 50	
1	Sekretariat	-	-	-	-	1	2	4	8
2	Bidang Keluarga Berencana							2	2
3	Bidang Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	1		-	1
3	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan							2	2
4	Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga					1		2	3
	JUMLAH					3	2	10	15

1.2 PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow diwarnai dengan beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 67 Tahun 2016 yang mengatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 56), mengakibatkan ketiadaan petugas yang melakukan koordinasi program dan kegiatan kabupaten dengan kecamatan/desa, serta pelaksanaan program dan kegiatan di lini lapangan;
2. Kekosongan beberapa jabatan struktural Eselon 4 dan kurangnya staf



pelaksana membuat tugas pokok dan fungsi jabatan kosong tersebut membebani dan harus dikerjakan oleh pejabat struktural lainnya, sehingga waktu pengerjaan tugas pokok dan fungsi, menjadi lebih lama dan capaian kinerja tidak maksimal;

3. Penarikan Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) ASN Daerah menjadi ASN Pusat dan proses pengadaan Petugas Penyuluh baru yang menjadi wewenang pemerintah pusat, membuat pemenuhan atas petugas lini lapangan menjadi lebih lama dan terjadi kekosongan koordinator di wilayah, sedangkan cakupan wilayah yang menjadi tanggungjawab dinas sangat besar;
4. Kurangnya tenaga penggerak Program dan Kegiatan di Kecamatan, terutama di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah terbentuk selang waktu 2016 – 2022 sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Kampung KB dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di lini lapangan serta perlunya kerjasama lintas sektor dalam penggarapan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2025- 2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Strategi Kabupaten Bolaang Mongondow periode tahun 2024 - 2026 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Maka visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 – 2029 adalah :

Bolmong Maju dan Sejahtera (Bolmong Juara)

Sebagai penjabaran atas visi diatas, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam periode empat tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan sumber daya yang cerdas;
2. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas berdimensi kewilayahan serta ramah lingkungan
3. Terwujudnya Pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintah yang Amanah
4. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat
5. Terwujudnya stabilitas politik, pemerintahan, sosial budaya yang toleran serta meningkatkan Upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan .

Berdasarkan pada visi dan misi Rencana Pembangunan startegis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 – 2096 maka disusun tujuan pembangunan selama empat tahun ke depan. Dalam penetapan 6 (enam) tujuan pembangunan selama 4 tahun ke depan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai tugas dan fungsinya mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Mewujudkan Penurunan laju pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang, dengan indikator Kinerja Tujuan yaitu menurunkan angka kelahiran atau Total Fertility rate (TFR) dan meningkatkan peserta KB aktif.


Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE				
				2025	2026	2027	2028	KET
1	Mewujudkan Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang	TFR (Total fertility Rate)	2,43	2,43	2,19	2,19	2,19	
		Peserta KB Aktif	77,25	77,34	89,92	89,92	89,92	

Sumber : Rencana Strategis DPPKB Kab. Bolmong, 2025-2026 , dan Indikator Komitmen Bersama antara DPPKB Kabuapten dan KemendugBangga Prov Sulawesi Utara Tahun 2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan penurunan laju pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang .

- Menurunkan angka kelahiran Wanita Usia Subur (15-19) Tahun

Indikator Tujuan : Penundaan Kelahiran usia 15-19 Tahun

Sasaran : Menurunnya angka kelahiran Wanita Usia Subur

Indikator Sasaran: Presentase angka kelahiran Wanita Usia Subur

- Meningkatkan Jumlah peserta KB Aktif

Indikator Tujuan : Prsentase peserta KB aktif yang memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Sasaran : Meningkatkan jumlah peserta KB Aktif

- Indikator Sasaran : Mempertahankan kesertaan ber KB

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan



Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran	
1.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Total fertility rate (TFR)	2,43	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.	2.692.5333.314,00
				2. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	301.200.000,00
				3. Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp.	3.678.132.999
2.	Meningkatnya Peserta KB aktif	Peserta KB Aktif	77,34	4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp.	1.551.200.000
Jumlah					Rp.	8.223.066.313

Sumber : SIPD DPPKB Kab. Bolmong, 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap pernyataan strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

1) Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

2) Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-



masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	= Sangat berhasil
70 $X \leq 85$	= Berhasil
71 $55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
72 ≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator setiap kategori} \times \text{Nilai Mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil:	92,5
Berhasil :	77,5
Cukup Berhasil :	62,5
Tidak Berhasil :	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil**.

3.1.2 Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran

Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan dari hasil pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja sasaran sebagai berikut :



Sasaran I: Menurunnya Angka Kelahiran Wanita Usia Subur

Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 “Menurunnya Angka Kelahiran Wanita Usia Subur” dengan indikator sasaran Total Fertility Rate (TFR) yaitu menghitung jumlah kelahiran dari perempuan umur 15 – 49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah Perempuan umur 15-49 tahun pada periode yang sama. Dapat dilihat seperti table di bawah ini :

**Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2025
Kabu. Bolaang Mongondow**

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH KELOMPOK UMUR	JUMLAH KELAHIRAN	ASFR	TFR
1	15 - 19 Tahun	10.581	408	38,56	0,193
2	20 - 24 Tahun	11.444	890	77,77	0,389
3	25 - 29 Tahun	10.281	905	88,03	0,440
4	30 - 34 Tahun	9.178	603	65,70	0,329
5	35 - 39 Tahun	7.365	308	41,82	0,209
6	40 - 44 Tahun	8.590	96	11,18	0,056
7	45 - 49 Tahun	9.202	25	2,72	0,014
JUMLAH		66.641	3.235	325,77	1,629

➤ Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja tahun 2025

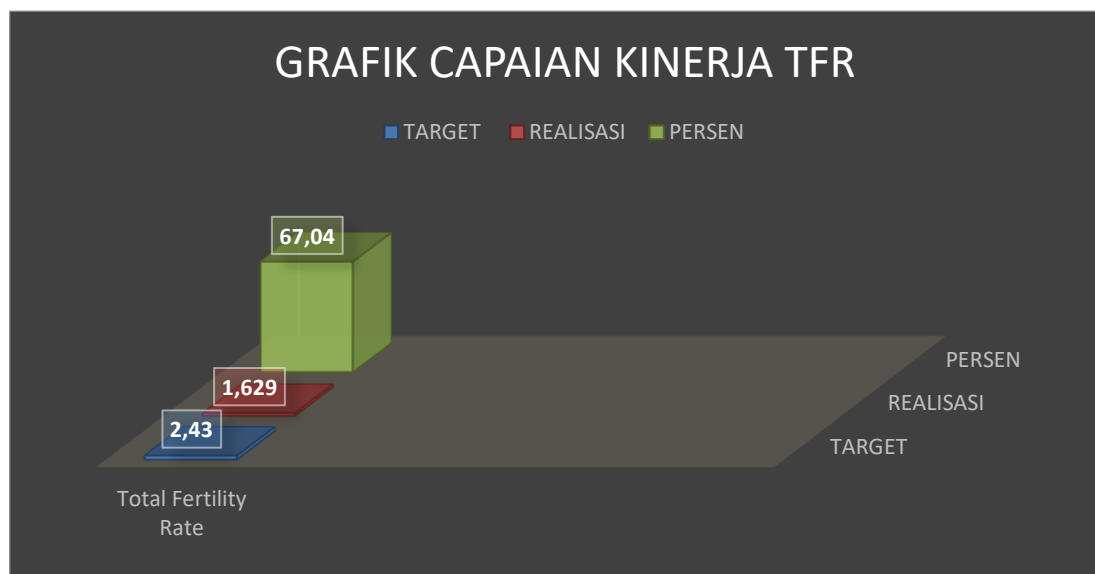
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian %
Presentase Total Fertility Rate	2,43	1,629	67,04

Berdasarkan table di atas pada tahun 2025 dari target 2,43 yang ingin dicapai, yang terealisasi sebesar 1,629 dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 67,04 persen. Maka pencapaian tujuan kinerja sasaran presentase total rata-rata angka



kelahiran adalah kategori “ Berhasil ”.

Untuk grafik target dan realisasi dapat dilihat dibawah ini :



- **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

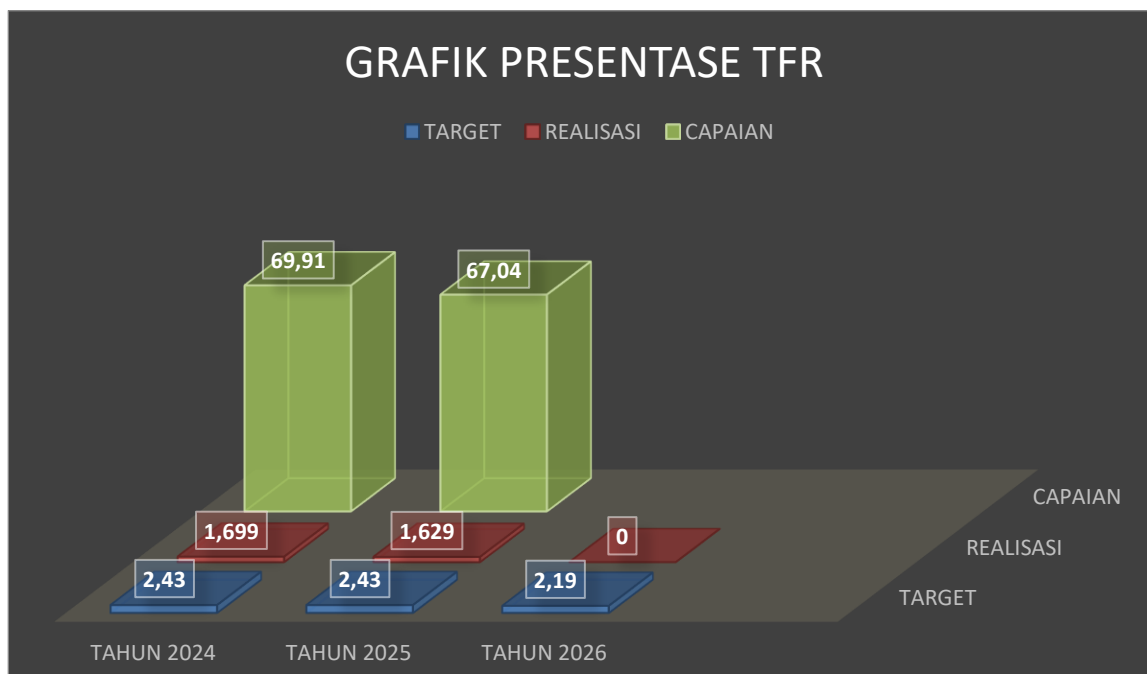
Indikator Kinerja	Capaian kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap target Akhir Renja	
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Persen	Target	Persen
Presentase Total Fertily Rate	2,43	1,699	69,91%	2,43	1,629	67,04%	2,41	70.50

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran Total Fertility Rate (TFR) pada table di atas, disimpulkan bahwa capaian indikator prosentase Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2024 sebesar 1,699 atau 69,91 persen dari target 2,43. Dan di tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar 1,629 atau 67,04 persen. Untuk Melihat keberhasilan dari TFR ini, semakin kecil nilai yang kita dapat berarti pengendalian atau penekanan angka kelahiran tercapai. Namun jika dilihat dari target yang ditetapkan masih sekitar 30 persen dari jumlah target 2.43. Dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori ‘BERHASIL’. Hal ini disebabkan karena presentase capaian antara 2024 dan 2025 terjadi



Penurunan sebesar 2,87 persen. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

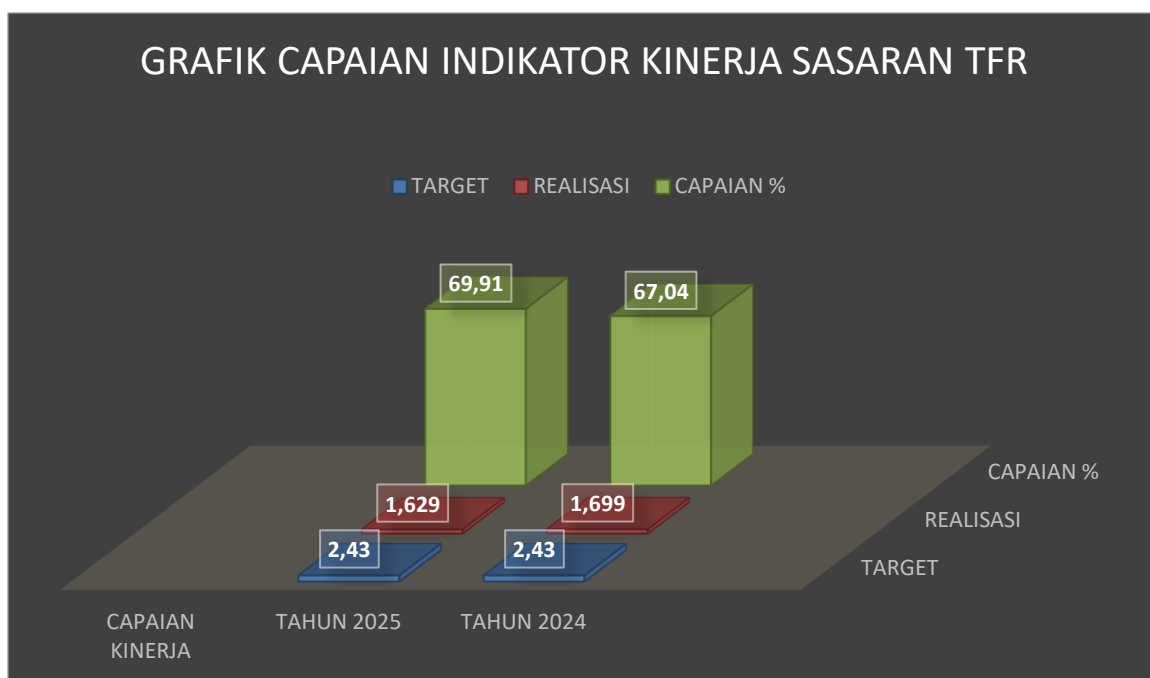
- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis**



organisasi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2019	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025	
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Total Fertility Rate	-	-	-	-	-	2,43	1,699	69,91	2,43	1,629

Berdasarkan capaian indikator kinerja Total Fertility Rate pada tabel diatas, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja prosentase Total fertility Rete dapat tertangani dengan baik pada tahun 2024 sampai 2025. Dengan demikian capaian kinerja, jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “BERHASIL”. Hal ini dilihat pada prosentase capaian Grafik dibawah ini;



- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 ini dengan standar nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Prov Sulawesi Utara Tahun 2025			Capaian Kinerja DPPKB Kab. Bolmong Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Total Fertility Rate	2,23	2,06	92,37	2,42	16,29	67,04

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) pada tabel diatas, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara prosentase untuk TFR tahun 2025 realisasinya sebesar 2,06 atau 99,51 persen dari target 2,23 dan capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bolaang Mongondow prosentase TFR (Total Fertility Rate) tahun 2025 realisasinya sebesar 1,629 % dari target 2,43. Dengan demikian capaian kinerja antara DPPKB Kab Bolaang Mongondow jika dininai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori BERHASIL dan Perwakilan BKKBN Prov. Sulut dikategorikan BERHASIL. Keberhasilan DPPKB Kab. Bolaang Mongondow dikarenakan tersedianya anggaran yang disediakan BBKBN RI lewat perwakilan BKKBN Provinsi Sulut.



➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Salah satu indikator penting dalam upaya penurunan Laju Pertumbuhan penduduk adalah angka kelahiran pada Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang bisa diukur dengan angka Total Fertility Rate (TFR).

TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (15-49 Tahun). Penurunan TFR terus diupayakan karena dengan turunnya angka ini maka upaya pengendalian jumlah penduduk bisa dikatakan berhasil.

Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya Angka Kelahiran Total (TFR) dan ASFR salah satunya penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga tidak lepas dari dukungan oleh berbagai pihak diantaranya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Dari segi Pembiayaan, Pemerintah pusat telah mengalokasi dana APBD dan APBN untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebesar Rp. 8.223.066.313- khusus untuk Program Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, dimana Rp. 3.979.332.999,- berasal dari dana DAK BOKB tahun 2025.

Dukungan ini tentunya mendorong aktifitas atau kegiatan yang mendukung capaian target TFR. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bolaang Mongondow pada tahun 2025 ini diantaranya penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal, pelaksanaan sarasehan hasil pemuktahiran data keluarga, pelaksanaan rapat pengendalian program Bangga Kencana, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga, penyediaan data dan informasi keluarga, pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB.

Selain itu dilakukan pula hal-hal yang bersifat teknis seperti promosi pendewasaan usia perkawinan melalui program Generasi Berencana (GenRe) dan Sekolah Siaga Kependudukan sebagai upaya preventif untuk menekan angka ASFR 15-19 tahun.



Sasaran II: Meningkatnya Peserta KB Aktif

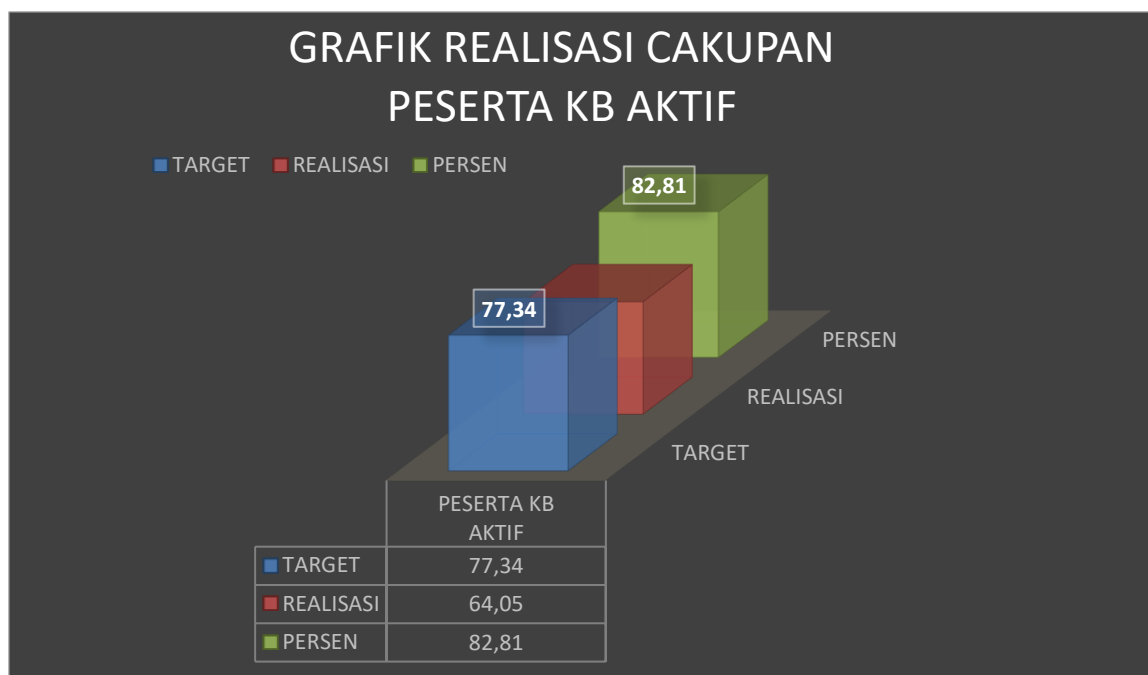
Pengukuran capaian kinerja sasaran II “ Meningkatnya Peserta KB aktif dengan indikator sasaran adalah Peserta KB Aktif, dengan formula pengukuran seperti seperti table di bawah ini :

TABEL 11 JUMLAH PESERTA KB AKTIF BULAN : DES - 2025												
Prov : SULAWESI UTARA												
Kab : BOLAANG MONGONDOW												
KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRAS ESI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTO	TUBEKT	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(4-11)	13
05	SANG TOMBOLANG	1075	586	169	1	283	5	0	28	0	1072	3
09	DUMOGA BARAT	1426	1116	185	4	297	30	2	53	0	1687	23
10	DUMOGA TIMUR	1764	1249	312	61	376	19	2	31	1	2051	13
11	DUMOGA UTARA	1706	1131	184	9	313	16	1	38	3	1695	11
12	LOLAK	1754	1016	523	3	427	8	2	69	1	2049	5
13	BOLAANG	1709	856	348	4	429	8	2	45	2	1694	15
14	LOLAYAN	2449	1236	474	10	966	62	2	83	0	2833	16
19	PASSI BARAT	1639	813	175	11	569	23	1	43	0	1635	4
20	POIGAR	1640	938	261	4	356	18	2	55	0	1634	6
22	PASSI TIMUR	1537	826	216	2	446	10	2	34	0	1536	1
31	BOLAANG TIMUR	1041	639	145	4	191	8	0	40	0	1027	14
32	BILALANG	903	422	376	1	85	6	0	5	0	895	8
33	DUMOGA	1863	1048	319	5	418	13	0	56	0	1859	4
34	DUMOGA TENGGARA	1045	551	184	11	256	2	0	20	0	1024	21
35	DUMOGA TENGAH	1279	793	151	30	231	18	1	48	3	1275	4
JUMLAH TOTAL		22830	13220	4022	160	5643	246	17	648	10	23966	148

➤ Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%
Peserta KB Aktif	77,34	64,05	82,91%

Berdasarkan table di atas pada tahun 2025 dari target 77,34 dan yang terealisasi 64,05 dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 82,91 persen. Maka pencapaian tujuan kinerja sasaran presentase total rata-rata angka kelahiran adalah kategori “ Berhasil ”
Untuk grafik target dan realisasi dapat dilihat dibawah ini :



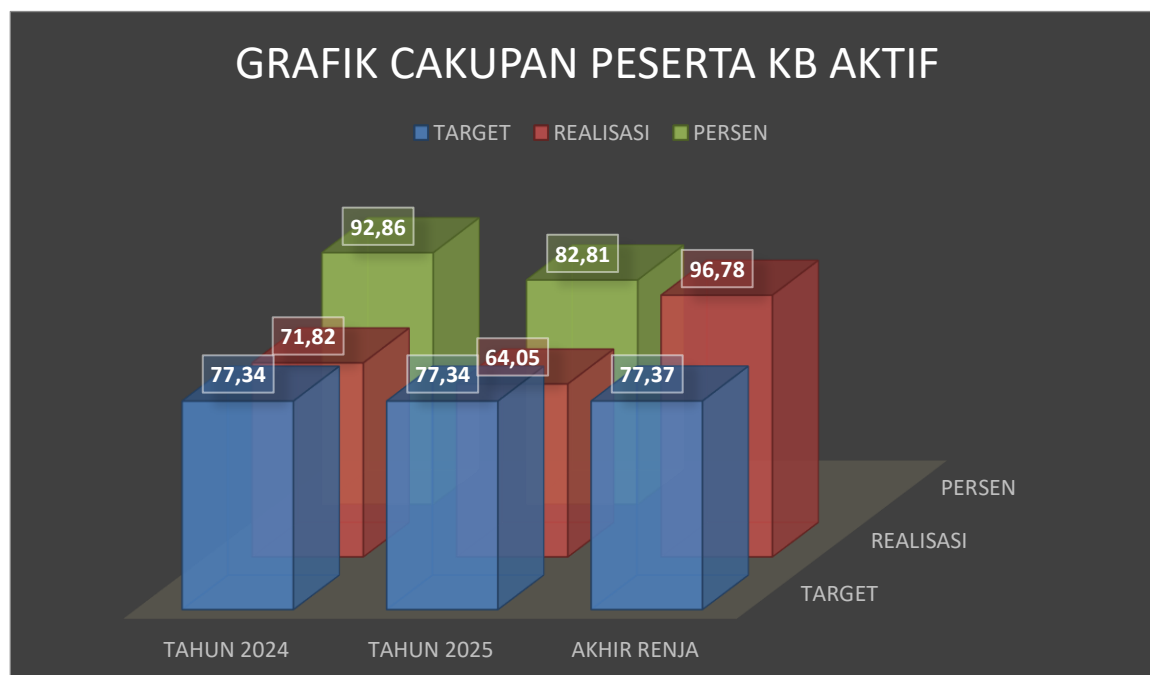
- **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap target Akhir Renja	
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi
Peserta KB Aktif	77,34	71,92	92,86 %	77,34	64,05	82,81%	77,37	96,78

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran Peserta KB Aktif pada table di atas, disimpulkan bahwa capaian indikator Presentase Peserta KB Aktif pada tahun 2024 sebesar 71,92 persen dan target tahun 2024 sebesar 77,34 persen. Namun tahun 2025 terjadi penurunan sedikit sebesar 10,05 persen. Sehingga target tahun 2025 untuk Peserta KB Aktif seperti yang ditetapkan di Renstra tahun 2025-2029 jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori 'BERHASIL'. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan Program dan pelayanan KB di Masyarakat, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, Penyuluhan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten.



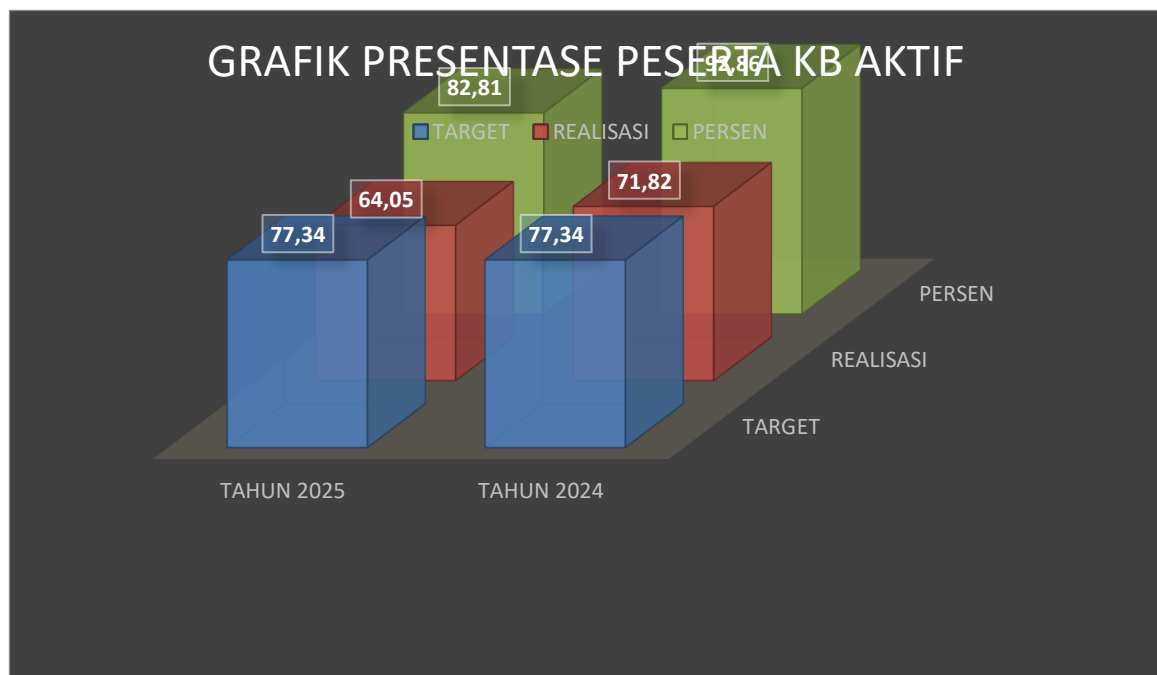
Seperti pada dapat dilihat pada grafik di bawah ini .



- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2018	Capaian Kinerja 2019	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Tahun 2023	
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Peserta KB Aktif	-	-	-	-	-	77,34	64,05	82,81	77,34	71,82

Berdasarkan capaian indikator kinerja Peserta KB Aktif pada tabel diatas, disimpulkan bahwa Capaian indikator kinerja prosentase Peserta KB aktif tertangani dengan baik pada tahun 2024 sampai 2025. Dengan demikian capaian kinerja, jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “ BERHASIL”. Hal ini dilihat pada prosentase capaian Grafik dibawah ini;



- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 ini dengan standar nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Prov Sulawesi Utara Tahun 2024			Capaian Kinerja DPPKB Kab. Bolmong Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peserta KB Aktif	60,40	61,8	102,3	77,34	64,05	82,81%

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Peserta KB Aktif pada tabel diatas, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Utara tertangani dengan sangat baik di tahun 2024. Dapat dilihat pada realisasinya sebesar 102,3% dari target 60,40 dan capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bolaang Mongondow prosentase Peserta KB Aktif tertangani dengan baik. Dapat dilihat pada tahun 2025. Terlihat pada realisasinya sebesar 64,05 % dari target 77,34 Dengan demikian capaian kinerja antara Kemendukbangga Provinsi Sulut dan DPPKB Kab. Bolaang Mongondow tahun 2025 tidak terjadi perbedaan signifikansi. Kemendugbangga Sulut jika dinilai dari skala ordinal SANGAT BERHASIL dan DPPKB Kab. Bolaang Mongondow juga BERHASIL. Hal ini



disebabkan karena tahun 2024 anggaran yang disediakan dapat terserap dengan baik. Bahkan jika dilihat realisasi anggaran tersepat sampai, 94 persen.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang merupakan metode kontrasepsi dengan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain sehingga untuk Kab Bolaang Mongondow menjadi metode kontrasepsi MKJP menjadi metode yang diminati. Itu terlihat dari kuarangnya realisasi anggaran. Jenis MKJP ini merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya dapat bertahan selama 3 tahun sampai 10 tahun. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang terdiri dari IUD (Intra Uterine Device). Pemakaian alat kontrasepsi Implant lebih disukai Masyarakat, dengan alasan tidak terlalu beresiko.

Pemakaian beberapa metode kontrasepsi yang digunakan untuk menjaga jarak kehamilan, diantaranya adalah mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) atau yang lebih familiar dengan sebutan alat kontrasepsi modern dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). mCPR terdiri dari penggunaan alat kontrasepsi Suntik, PIL, IUD, Implant, Kondom, MOP (Sterilisasi pada Pria), MOW (Sterilisasi pada Wanita) dan MAL (Metode Amenore Laktasi/Ibu Menyusui). Selain penggunaan alat kontrasepsi, anggaran dan tenaga penyuluh di lapangan bekerja dengan baik dan maksimal dalam meningkatkan peserta KB Aktif

Beberapa langkah sudah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bolaang Mongondow untuk menaikkan dan mempertahankan angka peserta KB aktif, diantaranya sosialisasi dan promosi program KB dengan melibatkan mitra kerja terkait baik pemerintah maupun swasta, melakukan distribusi alokasi antar fasilitas kesehatan, Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak, Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran serta Peningkatan Kesertaan KB Pria.

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal, dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka



perlu didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

Implementasi Kebijakan kampung KB juga ditujukan untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS, menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatkan derajat kesehatan pada umumnya. Karenanya Kampung KB ini dipilih dan dimasukkan dalam Indikator Kinerja pada program Pembinaan Keluarga Berencana, Renstra. 2021-2026. Kampung Kb sendiri diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, yakni Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan.

➤ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Capaian Efisiensi Sumber daya
Total Fertility Rate	1,629	71,43	BAIK
Peserta KB Aktif	82,81	77,67	BAIK

Jika dikaitkan antara realisasi kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian Indikator sasaran yang relative baik yaitu 71,43 dan 77,67 dengan penyerapan anggaran sebesar 94,01 persen menunjukkan indikator bahwa Tingkat efisiensi indikator kinerja penggunaan sumber daya adalah sangat baik

➤ Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
I.	Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	301.200.000	215.148.843	71,43 %
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	301.200.000	215.148.843	71,43 %
2.	Program Pembinaan Keluarga	3.678.132.999	2.856.905.468	77,67



	Berencana			
	Kegiatan : Pelaksanaan advokasi, komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.450.000.000	1.338.755.468	77,67
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	1.616.000.000,	1.213.133.500	75,07
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab./Kota	556.132.999	249.516.500	44,87
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	56.000.000	55.500.000,	99,11

Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pencaapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2025 di tampilkan pada table berikut

TABEL 3.2
Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian
				Target	Realisasi	%	
1.	Mewujudkan penurunan penduduk menuju	Mengendalikan Laju pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,43	1,629	71,43	BERHASIL



	penduduk tumbuh kembang seimbang	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Peserta KB Aktif	77,34	64.05	82,81	BERHASIL
--	----------------------------------	-------------------------------	------------------	-------	-------	-------	----------

Kesimpulan capaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana untuk sasaran pertama mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan indikator sasaran total Fertility Rate jika dinilai dengan skala ordinal BERHASIL dan untuk meningkatnya Peserta KB aktif dengan indikator sasaran meningkatnya peserta KB Aktif jika dinilai dengan skala ordinat masuk pada kategori BERHASIL



3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2024, memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD Tahun 2024 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

3.2.1 Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar Rp. 7.203.185.462,- dibanding anggaran yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 sebesar Rp. 7.868.184.922,-

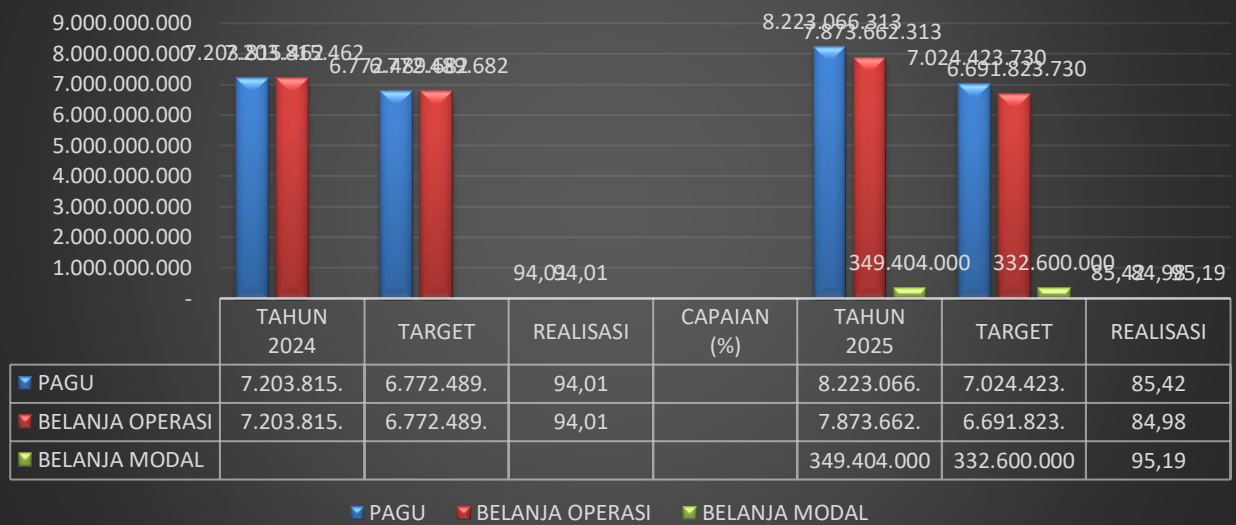
Perbandingan realisasi anggaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2022 dan tahun 2024, dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2023 dan tahun 2024

Jenis belanja	Tahun 2024			Tahun 2024		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pagu	7.203.815.462-	6.772.489.682	94,01	8.223.066.313,	7.024.423.730	85,42
Belanja Operasi	7.203.815.462-	6.772.489.682	94,01	7.873.662.313	6.691.823.730	84,98
Belanja Modal				349.404.000	332.600.000	95,19



GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2024 DAN 2025



Belanja Operasi yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bolaang Mongondow dari APBD pada Tahun 2025 sebesar Rp. 7.873.662.313 dibanding anggaran yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 sebesar Rp 6.772.489.682,-

Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow ada belanja modal sebesar 349.404.000, namun di tahun sebelumnya yakni tahun 2024 tidak ada belanja modal . Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2025 mencapai Rp 6.691.823.730 dibandingkan Tahun 2024 di mana belanja operasi terealisasi sebesar Rp.. 6.772.489.682



Tabel 3.4.
REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2024	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
BELANJA DAERAH	8.223.066.313,00	7.024.423.730,00	85,42	6.772.489.682,00
BELANJA OPERASI	7.873.662.313,00	6.691.823.730,00	84,98	6.772.489.682,00
Belanja Pegawai	2.108.515.539,00	1.881.695.019,00	89,24	2.004.948.552,00
Belanja Barang dan Jasa	5.765.146.774,00	4.810.128.711,00	83,43	4.767.541.130,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	7.873.662.313,00	6.691.823.730,00	84,98	6.772.489.682,00
BELANJA MODAL	349.404.000,00	332.600.000,00	95,19	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	349.404.000,00	332.600.000,00	95,19	0,00
JUMLAH BELANJA	8.223.066.313,00	7.024.423.730,00	85,42	6.772.489.682,00
SURPLUS/DEFISIT	(8.223.066.313,00)	(7.024.423.730,00)	85,42	(6.772.489.682,00)

Sumber: Hasil Olahan Data Pelaporan SIPD, 2025

3.3 Anggaran dan Realisasi

Pelaksanaan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kab Bolaang Mongondow tahun 2025 sesuai anggaran dan realisasi masing-masing program/kegiatan ditunjukkan seperti pada table 17 sebagai berikut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Program : Pengendalian Penduduk	301.200.000	215.148.843	71,43
	Kegiatan : Kegiatan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kab/Kota.	301.200.000	215.148.843	71,43



2	Program : Pembinaan Keluarga Berencana	3.678.132.999	2.856.905.468	77,67
a	Kegiatan : Pelaksanaan advokasi, komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.450.000.000	1.338.755.468	92,23
b	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	1.616.000.000	1.213.133.500	75,07
c	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab./Kota	556.132.999	249.516.500	44,87
d	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KBpembinaankesertaan ber KB	56.000.000,	55.500.000	99,11
3	Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.551.200.000	1.536.422.500	99,05
	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.551.200.000	1.536.422.500	99,05
4	Program : Yang Tertib Dan Akuntabel Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	2.692.533.314	2.415.946.919,	89,27
a	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.135.616.532	1.906.395.458	89,27
b	Kegiatan : Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	66.324.780,	65.649.780	98,98
c	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	349.404.000	332.600.000	95,19
d	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.000.000,	59.000.000	100
e	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.188.002	52.301.681	63,64
TOTAL		8.223.066.313	6.980.923.730,	84,89

Sumber: Hasil Olahan Data Pelaporan SIPD, 2025

3.3.1 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian realisasi kinerja



keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sebagian besar anggaran yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana dari Pemerintah Pusat. Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK Subbidang KB Fisik dan BOKB Non Fisik Tahun 2024⁵ dikeluarkan oleh BKKBN RI di akhir Bulan Desember Tahun 2024 setelah proses perencanaan anggaran melalui SIPD selesai. Keterlambatan ini, membuat anggaran yang telah diinput dalam SIPD, harus disesuaikan lagi mengacu pada Juknis tersebut melalui prosedur pergeseran Tahap I yang dilaksanakan pada awal Triwulan I, sehingga mempengaruhi proses pencairan anggaran dan membuat pelaksanaan program/kegiatan baru bisa dilakukan setelah pergeseran tuntas di akhir Triwulan II Tahun 2025. Hal ini, tentu saja mempengaruhi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai anggaran DAK yang menggeser seluruh jadwal ke awal Triwulan III, dan tentu saja mempengaruhi serapan anggaran dan realisasi anggaran secara keseluruhan.
2. Program Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga yang dijalankan di Kampung KB dan Balai Penyuluhan KB tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya Petugas Penyuluh Keluarga Berencana selaku koordinator program dan kegiatan di lini lapangan. Saat ini di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow hanya ada 7 (tujuh) orang Penyuluh Keluarga Berencana yang ditugaskan oleh BKKBN Pusat yang bekerja membawahi 15 (lima belas) Balai Penyuluhan di kecamatan, untuk mengelola program dan kegiatan yang dilaksanakan di 29 (dua puluh sembilan) Kampung KB dengan jumlah kelompok kegiatan sebanyak 113 (seratus tiga belas) kelompok yang terdiri dari:
 - a. Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 22 Poktan;
 - b. Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 12 Poktan;
 - c. Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 30 Poktan;



- d. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebanyak 15 Poktan;
- e. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebanyak 9 Poktan;
- f. Rumah Dataku sebanyak 5 Poktan; dan
- g. Desa Stunting sebanyak 20 Desa.

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Kegiatan : Adminstasi Keuangan

Perangkat Daerah Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN mencapai target kinerja keuangan sebesar 97,62 %. Tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mencapai target kinerja keuangan sebesar 99,80 %. Tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.

2. Kegiatan : Adminstrasi Umum Perangkat

Daerah. Sub. Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD capaian target kinerja 99,86 %. Tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.

3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah. Sub. Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, capaian target kinerja sebesar 99,86 %. Sudah sesuai dengan realisasi karena terjadi penghematan penggunaan daya listrik dalam setahun.



3.4.1 Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

- a. Pencatatan dan pengumpulan data Keluarga, capaian target kinerja sebesar 100%.
- b. Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB target kinerjanya menjangapai 100%, tidak ada permasalahan
- c. Pembinaan dan pengawasan, pencatatan dan pelaporan program KKBPK capaian target kinerja sebesar 97,04 %. Tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.

3.4.2 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub.

Kegiatan :

- a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, capaian kinerja keuangannya sebesar 86,57 %.
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Lokal, capaian kinerja keuangannya sebesar 46,57%. Kegiatan ini dilaksanakan namun anggaran tidak dapat diambil karena keterbatasan waktu
- c. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang. Capaian kinerja keuangannya sebesar 99,42 %. Anggaran ini digunakan untuk mendukung sosialisasi percepatan penurunan stunting melalui media cetak dan media elektronik.
- d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya /Minilok), capaian target kinerja sebesar 99,81 %. Anggaran ini digunakan untuk mendukung koordinasi percepatan penurunan stunting melalui kegiatan pertemuan tingkat kecamatan.
- e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB,



capaian target kinerja sebesar 96,27 %. Tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.

- f. Pengendalian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKKBPK), capaian kinerja keuangannya sebesar 95.06 %. Anggaran ini digunakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Audit Kasus Stunting,

2. Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan : Penggerakkan kader institusi Masyarakat pedesaan. Capaian target kinerja keuangannya sebesar 95,70 %. Tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.

3. Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di di daerah kabupaten/kota.

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Capaian target kinerja keuangannya sebesar 99,99 %. Tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokasi) dan sarana penunjang pelayanan KB capaian target kinerja sebesar 66,94 %. Anggaran ini hanya dapat diserap sebagian, karena adanya konversi pemakaian alat kontrasepsi. Dari pemakaian IUD MOP MOW ke alat kontrasepsi implant.
 - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, kegiatan Realisasi fisik mencapai 0%. Dapat tahun 2025 tidak ada belanja fisik
 - d. Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, capaian target kinerja 90,64 %.
4. Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Sub Kegiatan :



Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB. Capaian Target Kinerja 98,35 %. Tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.

3.4.3 Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera (KS)

1. Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sub. Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Capaian target kinerja keuangan diserap sebesar 99,77 %. Tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.
- b. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Capaian target kinerja keuangan hanya dapat diserap sebesar 98.8. Hal ini terjadi karena karena keterlambatan proses pencairan anggaran dan pelaksana kegiatan adalah mitra kerja pendamping keluarga di lini lapangan, sehingga tidak memungkinkan untuk mempercepat serapan anggaran.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan paparan pengukuran capaian kinerja organisasi, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, pada Sasaran “ Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Peserta KB Aktif “ dengan indikator sasaran angka Total fertility Rate (TFR) mencapai realisasi sebesar 1,629 dari target Tahun 2025 sebesar 2,43. Kinerja yang dicapai untuk sasaran ini, semakin rendah nilai realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan pada skala ordinal yang dikategorikan BERHASIL.

Sementara untuk meningkatnya peserta KB Aktif dengan indikator kinerja peserta KB aktif jika dihitung dengan skala ordinal dikategorikan BERHASIL. Karena capaian kinerja pada tahun 2025 termasuk BAIK. Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 mencapai 82,81 Persen.

Berbagai program dan Kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil perencanaan Program dan Kegiatan yang telah melibatkan berbagai *Stakeholders*. Pelaksanaan program dan kegiatan tetap berada pada alur dan koridor perencanaan strategis 2025 – 2029, sehingga semua kegiatan yang telah dikerjakan tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Bupati Bolaang Mongondow yaitu Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan mandiri sebagai lumbung pangan Indonesia Timur . Sebagai Satuan Kerja perangkat daerah yang berada dalam organisasi Pemerintahan Kabupaten, maka program-program yang dilakukan tetap dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, dan diarahkan sebagai media dan sarana untuk mendukung Visi dan Misi serta Rencana Strategi Kabupaten Bolaang Mongondow. Sangat disadari, masih diperlukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :

1. Menetapkan koordinator yang bertanggungjawab dengan membagi wilayah kerja tentang semua program kerja dan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa, untuk menggantikan peranan UPTD yang telah dihapus berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;



2. Melaksanakan kegiatan yang terintegrasi secara berjenjang yang dimulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan sampai kabupaten dengan OPD terkait.
3. Memberdayakan Institusi Masyarakat Perdesaan, PPKBD/Sub PPKBD dan PLKB sebagai tenaga sukarela untuk melaksanakan Program KKBPK di lini lapangan;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dan unsur- unsur masyarakat di tingkat kecamatan, yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Koordinasi perencanaan dan penganggaran dengan OPD lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan di atas, diharapkan ke depannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow 2025 – 2029

4.2 Saran Tindak Lanjut

Untuk selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow dalam bentuk sebagai berikut:

1. Memberikan masukan tentang tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan yang telah diberikan dan tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan DPPKB Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk membantu dan bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar



pelayanan yang diberikan bisa lebih optimal. Kerjasama ini antara lain dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi aktif;

3. Diharapkan untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang telah diterapkan selama ini, sehingga Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, tentunya menjadi tugas dan kewajiban bersama untuk menyempurnakannya di masa yang akan datang. Atas seluruh upaya perbaikan dan penyempurnaan LKIP ini dan peran serta semua pihak disampaikan terima kasih.

Semoga upaya peningkatan kinerja untuk ikut membangun bangsa dan Negara, khususnya Pemerintah Bolaang Mongondow mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT.

Lolak, Februari 2026.
KEPALA DINAS



JULIN ESTER PAPULING, SKM. ME
NIP.19700706 199203 2 007

